

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1999. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.
- Wuryanto, Doddy et.al. 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 2003. *Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____ 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1999. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Susanto, Anthon F. 2010. *Teori-Teori Hukum dan Implementasinaya dalam Wajah Peradilan Kita*. Reflika Aditama. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana